

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, untuk terciptanya kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Pesan yang mendasar dari UU No. 22 tahun 1999 adalah mendorong proses pemberdayaan (peningkatan ekonomi), menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan tersebut menuntut adanya pemahaman yang lengkap terhadap seluruh tantangan dan masalah. Peran pemerintah daerah sangat menentukan kebijakan pembangunan ekonominya. Kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaan di dalam menggalang berbagai pelaku, serta keseriusan dan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunannya. Pemerintah daerah dalam upaya memantapkan otonomi daerah dan persiapan menghadapi tantangan ke depan serta mengupayakan pengelolaan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung yang dimiliki.

Pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan oleh UU No. 32 tahun 2004 adalah pembangunan ekonomi yang dicapai dengan cara memanfaatkan potensi daerah secara optimal dengan kebijakan dan kewenangan (authority) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak terlepas dari potensi dan daya dukung daerah berupa Sumber Daya Alam (SDA), sarana dan prasarana, modal yang tersedia, serta kemampuan sumber daya manusia dan kewenangan Pemerintah Daerah yang digunakan dengan seoptimal mungkin. Kemampuan Pemerintah Daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan diwilayahnya semakin penting dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

“Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah tersebut” (Arsyad, 1999 : 298). Kewenangan daerah semakin luas dalam menentukan pembangunannya setelah Undang-Undang tentang Otonomi Daerah tahun 2001 diberlakukan.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu sektor penting dalam pembangunan adalah pembangunan ekonomi sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan pertanian tanaman perkebunan). “Keberhasilan pembangunan sektor pertanian dalam peninjauan dan kesediaan bahan pangan bagi

masyarakat akan memacu perkembangan sektor lain yaitu sektor industri dan jasa serta dapat mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional”

Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Barat ikut membina dan mengarahkan pembangunan sektor pertanian yang ada di daerah ini. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. “Pembangunan ekonomi akan berjalan lebih efektif dan efisien jika disertai dengan suatu rencana yang baik” (**Adrimas, 2000**). Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan kewenangan (*authority*) yang dimiliki untuk menentukan berbagai macam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang resmi melakukan pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 7 Januari 2004, menjadi sebuah kabupaten yang membangun ekonomi masyarakatnya melalui pengembangan sektor pertanian. Dengan adanya otonomi daerah dan pemberian hak otonom kepada daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, Kabupaten Dharmasraya ingin membuktikan bahwa kabupaten ini mampu membangun ekonomi daerahnya dengan memanfaatkan kewenangan (*authority*) yang dimiliki untuk menentukan berbagai macam kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat. Perkembangan sektor pertanian yang merupakan sektor basis ekonomi di Kabupaten Dharmasraya di dukung oleh potensi daerahnya yang cukup bagus dan tidak terlepas dari struktur ekonomi agraris dan masyarakatnya. Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten yang terdiri dari empat kecamatan dimana memiliki potensi dan daya dukung pertanian yang berbeda-beda.

Daya dukung daerah merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan ekonomi Dharmasraya untuk tujuan peningkatan PDRB. Potensi dan daya dukung berupa sumber daya alam yaitu lahan pertanian beserta sarana dan prasarana irigasi yang dimiliki serta didukung oleh jumlah penduduk yang tersebar hampir merata. Dharmasraya sebagai daerah tujuan transmigrasi memiliki 73,84 % penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. **(Data BPS Sumbar)**

Daya dukung daerah dalam pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan otonomi daerah dalam menentukan perencanaan pembangunan ekonomi daerahnya. Pengembangan sektor pertanian di Dharmasraya dilakukan dengan dua kategori yaitu sub sektor pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Kebijakan pemerintah daerah Dharmasraya dalam mengembangkan sektor pertanian untuk meningkatkan pertumbuhannya selama periode 2004-2007 telah menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya.

Dengan kebijakan otonomi daerah yang dimiliki, Kabupaten Dharmasraya harus mampu merencanakan pembangunan ekonomi daerahnya dengan memanfaatkan potensi dan daya dukung disertai dengan perencanaan pembangunan yang juga mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang dimiliki oleh Dharmasraya. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dijadikan sebagai indikasi yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan ekonomi. Masing-masing sub sektor pertanian memberikan

kontribusi dalam PDRB dengan jumlah yang berbeda-beda. Sub sektor pertanian tanaman pangan yang memiliki daya dukung besar, namun sumbangannya dalam PDRB masih menunjukkan angka yang kecil. Strategi pembangunan andalan dan penuh perhitungan dalam memanfaatkan potensi dan daya dukung daerah dalam mencari sumber keuangan daerah akan menjadikan peluang untuk sukses.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti dan berusaha mengajukan solusi bagi pengembangan sektor pertanian dengan memanfaatkan daya dukung yang dimiliki daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengembangkan sektor pertanian, faktor yang harus tetap dipertimbangkan adalah aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman/tantangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi daerah melalui strategi pembangunan yang berbeda-beda dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Penulis tertarik menuangkan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pengaruh daya dukung lahan dan pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Dharmasraya”**

1.2. Perumusan Masalah

Daya dukung pertanian yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sangat mempengaruhi sumbangan sektor tersebut dalam PDRB dan pertumbuhan ekonomi Dharmasraya. Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah akan mendukung daerah dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Dari semangat dan prinsip

otonomi daerah dibawah UU No. 22 tahun 1999 dapat dilihat bahwa adanya keinginan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan peningkatan kapasitas daerah menuju masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan ekonomi berbasis daya dukung daerah akan dapat diperlihatkan dalam peningkatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama peningkatan dari masing-masing sektor. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2006 relatif lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2005, dimana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,46 persen. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya menurut harga berlaku tahun 2006 tercatat sebesar 1,51 triliun rupiah, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 17,28 persen dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2005. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang ditunjukkan oleh nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai 899,31 milyar rupiah tahun 2006 yang berarti mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 6,27 persen, dimana pada tahun 2005 nilai PDRB mencapai 802,39 milyar rupiah.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dharmasraya)

Adapun dalam penelitian ini yang dibahas adalah :

- a) Berapa besar pengaruh pengembangan sektor pertanian PDRB dan pertumbuhan ekonomi Dharmasraya.
- b) Berapa besar pengaruh daya dukung daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

- c) Bagaimana pemerintah daerah Dharmasraya melakukan strategi kebijakan pengembangan sektor basis ekonomi terutama pertanian dalam meningkatkan PDRB.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a) Untuk melihat perkembangan pembangunan selama periode otonomi daerah setelah pemekaran wilayah dengan melihat pertumbuhan dan peran sektor pertanian di Kabupaten Dharmasraya.
- b) Untuk melihat pengaruh daya dukung lahan dan pertumbuhan sector pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya
- c) Untuk mengetahui kebijakan pembangunan strategis yang dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya dalam mengembangkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi dan daya dukung sektor pertanian yang dimiliki.

1.4. Hipotesa

Dalam penulisan ini terdapat hipotesa diantaranya :

- a) Diduga pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya
- b) Diduga daya dukung lahan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi Dharmasraya dengan melihat pembangunan sektor pertanian yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dan daya dukung yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya. Pengembangan sektor pertanian Dharmasraya erat kaitannya dengan ketersediaan potensi dan daya dukung dalam jangka panjang yang dimilikinya.

Penulis membatasi ruang lingkup objek penelitian untuk menghindari penyimpangan penulisan. Analisa akan difokuskan pada daya dukung dan pertumbuhan sector pertanian yang dipergunakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mengembangkan sektor pertanian. Dalam menganalisa potensi dan daya dukung daerah, penulis juga mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman/tantangan (SWOT) yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan.

BAB II :Karangka Teori

Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan, serta penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan literatur dalam peninjauan ini.

BAB III :Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode analisis data dan sumber data yang digunakan

BAB IV :Gambaran Umum Perkembangan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya.

Berisi gambaran umum daerah penelitian dan melihat aspek-aspek pertumbuhan ekonomi serta daya dukung daerah tersebut

BAB V :Hasil dan Pembahasan

Berisi hasil dan pembahasan serta implikasi kebijakan dari penelitian yang di lakukan

BAB VI :Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil terhadap analisa yang telah dilakukan serta saran-saran yang merupakan masukan baik bagi industri maupun pemerintah.